



Selamat datang di LPEM Newsletter Edisi Juli 2023. LPEM Newsletter merupakan buah pemikiran dan rangkuman kegiatan tim LPEM FEB UI. Edisi ini merupakan keluaran ketiga dan senantiasa akan diterbitkan setiap bulannya. Sejak 1953, LPEM FEB UI secara aktif telah melakukan kegiatan penelitian, konsultasi, dan pelatihan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah pembangunan di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan banyak berfokus ke berbagai isu terkait kelembagaan, ekonomi regional, perdagangan internasional, keuangan dan perbankan, ekonomi fiskal dan moneter, pertanian, industri, pariwisata, pembangunan pedesaan, lingkungan, demografi, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan UMKM.

Pada edisi kali ini, LPEM Newsletter akan membahas secara singkat mengenai keikutsertaan LPEM FEB UI pada acara **Konferensi Indonesian Regional Science Association (IRSA)** ke-18. Selain itu, edisi ini juga merangkum informasi mengenai kerja sama proyek riset antara Copenhagen Business School dengan LPEM FEB UI.

Newsletter ini dibagikan secara luas ke kalangan pemerintah, akademisi, advokat dan aktivis lingkungan, NGO, media, serta masyarakat umum. Kami mendorong keterlibatan Anda dalam membagikan publikasi ini secara luas serta menjadikannya rujukan apabila dibutuhkan.

Selamat membaca,

Alin Halimatussadiah

Ketua Kelompok Riset Ekonomi Hijau dan Perubahan Iklim
LPEM FEB UI



HEADLINES

18th IRSA Conference

Diselenggarakan sebagai rangkaian acara dari Konferensi Indonesian Regional Science Association (IRSA) ke-18, LPEM FEB UI menyelenggarakan lokakarya berjudul '**Promoting Beyond GDP Indicators for Green and Inclusive Growth**'. Acara tersebut dihadiri oleh **Dr. Alin Halimatussadiah** (LPEM FEB UI) dan juga beberapa pembicara lainnya seperti **Ir. Medrilzam, M.Prof. Econ, Ph.D** (Direktur Lingkungan Hidup, Bappenas), **Robert Smith** (Senior Associate, IISD Canada), **Puji Kurniawan** (Direktorat Neraca Produksi, Badan Pusat Statistik, dan **Prof. Budy Resosudarmo** (ANU)



Scan untuk mengetahui informasi tentang LPEM FEB UI lebih lanjut.



marcom@lpem-febui.org

THE 18TH INDONESIAN REGIONAL SCIENCE ASSOCIATION (IRSA)

LOKAKARYA: 'PROMOTING BEYOND GDP INDICATORS FOR GREEN AND INCLUSIVE GROWTH'

Selengkapnya:

<https://bit.ly/PressReleaseBeyondGDP>



Diselenggarakan sebagai rangkaian acara dari Konferensi Indonesian Regional Science Association (IRSA) ke-18, LPEM FEB UI menyelenggarakan lokakarya berjudul Promoting Beyond GDP Indicators for Green and Inclusive Growth. Lokakarya tersebut dihadiri oleh **Dr. Alin Halimatussadih** (LPEM FEB UI), **Ir. Medrilzam, M.Prof. Econ, Ph.D** (Direktur Lingkungan Hidup, Bappenas), **Robert Smith** (Senior Associate, IISD Canada), **Puji Kurniawan** (Direktur Direktorat Neraca Produksi, Badan Pusat Statistik, dan **Prof. Budy Resosudarmo** (Australian National University).

Beberapa hal yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut antara lain (i) PDB sering digunakan sebagai indikator utama keberhasilan nasional; (ii) Mengatasi hal tersebut, penting agar pemerintah melihat pertumbuhan dan perkembangan negara dari lensa comprehensive wealth; (iii) IISD Canada telah mempublikasikan Laporan Comprehensive Wealth untuk Kanada pada tahun 2016 dan 2018. LPEM FEB UI dan SDGs UI bersama dengan IISD Canada saat ini sedang dalam proses penyelesaian laporan serupa untuk mendorong diskusi comprehensive wealth di Indonesia.

SPECIAL SESSION LPEM FEB UI X PROSPERA: REFORMASI PAJAK UMKM INDONESIA



Dalam agenda reformasi struktur pajak bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), LPEM FEB UI bekerjasama dengan Prospera mengadakan sesi bertajuk '*Special Session on Indonesian SMEs Tax Reform*' sebagai bagian dari **18th IRSA International Conference 2023**. Sesi tersebut dilaksanakan di IPB Convention Center, Bogor, dengan menghadirkan akademisi dari institusi ternama seperti **Rusan Nasrudin, Ph.D** (PROSPERA), **Chaikal Nuryakin, Ph.D** (LPEM FEB UI), **Dr. Himawan Saputro** (Kementerian Keuangan), **Moh. Dian Revindo, Ph.d** (LPEM FEB UI) dan juga **Atika Amalia** (Prospera) sebagai moderator.

Sesi dibuka oleh paparan dari **Dr. Himawan Saputro**, dimana beliau memaparkan studinya yang membahas mengenai penerapan beberapa ambang batas pajak dan bagaimana respon UMKM terhadap penerapan tersebut. Salah satu implikasi dari studi tersebut adalah bagaimana simplifikasi pajak untuk UMKM bisa diterapkan tidak hanya dari tinggi atau rendahnya persentase pajak, melainkan juga simplifikasi dari persyaratan pembukuan dan pencatatan atau administrasi. "Apabila akan menerapkan *tax simplification*, itu (bisa dilakukan) tidak hanya melihat murah atau mahal nya *tax rate*, tapi juga persyaratan pembukuan dan pencatatan (administrasi) juga (perlu) disimplifikasi, sehingga (bisa) mengurangi *compliance costs*" ujar Himawan.

Kemudian, sesi dilanjutkan dengan paparan yang disampaikan oleh **Chaikal Nuryakin, Ph.D**. Dalam sesi ini, beliau mempresentasikan studinya mengenai perilaku perusahaan terhadap ambang batas PPN di Indonesia. Dari studi tersebut, didapati bahwa banyak UMKM yang melakukan under-reporting, demi menghindari mendaftarkan perusahaan mereka untuk terdaftar PPN.

"Terdapat (kecenderungan) untuk bunching di angka 600 juta (batas wajib perusahaan untuk mendaftar PPN). Firms nggak mau lewat threshold itu. Karena kalau udah lewat, mereka harus (mendaftar menjadi) VAT registered. Setelah threshold-nya hilang, apa yang terjadi? Bunching-nya hilang. Berarti memang, firms ini bunching di sekitar threshold (demi menghindari menjadi bisnis yang terdaftar PPN)" papar Chaikal.

Selanjutnya, **Rus'an Nasrudin, Ph.D** memaparkan mengenai survey yang dilakukan oleh tim PROSPERA mengenai kebijakan reformasi pajak UMKM. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Januari - Februari 2023 dengan menggunakan survey telepon kepada lebih dari 66.000 calon responden dari Sensus Ekonomi 2016, dan berhasil mendapatkan 591 responden. Salah satu hasil dari survey tersebut yang patut disorot adalah bagaimana pengetahuan pelaku UMKM terhadap pajak. "Kami mendeteksi di antara responden yang bisa menjawab dengan presisi berapa sih kalau mereka bayar income tax dengan presumptive regime angkanya 4,8 threshold-nya, itu kurang dari sepertiga yang tau akan hal itu." Papar Rus'an.

Sesi terakhir dipaparkan oleh **Moh. Dian Revindo**, dimana beliau memaparkan penelitiannya yang berjudul "Enhancing Government Supports for MSMEs in Indonesia: Redefining MSMEs and Improving Taxpayer Education Strategy". Studi ini menyarankan adanya kebutuhan untuk redefinisi UMKM lewat peningkatan ambang batas atas untuk kategorisasi UMKM terutama untuk Usaha Menengah serta untuk UMKM berbasis ekspor, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 tahun 2021, guna meningkatkan daya saing UMKM dan akses terhadap sumber pendanaan. Dalam melakukan hal ini, perbandingan standar definisi UMKM dengan negara lainnya juga perlu dilakukan selain dengan menyesuaikan definisi UMKM dengan tingkat inflasi dan juga kurs yang berlaku serta dengan jumlah pegawai yang disesuaikan dengan adanya revolusi digital.

NEGARA PENGEKSPOR BATUBARA TERBESAR DUNIA PERLU BERALIH KE ENERGI HIJAU

Copenhagen Business School akan bekerja sama dengan LPEM FEB UI dalam studi bertajuk "Governing Green Transition: Barriers and Enablers of Power Sector Reform in Indonesia". Studi ini akan berlangsung mulai dari tahun 2023 hingga tahun 2028, di mana 15 institusi dan universitas dari Denmark dan Indonesia akan bekerja sama dalam sebuah consultative group. Alin Halimatussadiyah selaku Kepala dari Green Economy and Climate Research Group LPEM FEB UI menjadi perwakilan dari LPEM FEB UI dalam consultative group tersebut. Meskipun memiliki potensi yang tinggi dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) seperti surya, angin, hidro, biomassa, dan panas bumi,

Selengkapnya: <https://bit.ly/CBSGreenEnergy>



Indonesia menghadapi tantangan dan hambatan dalam bertransisi dari penggunaan energi fosil. Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi setengah dari emisi karbon pada tahun 2023, tapi di lain sisi masih sangat bergantung pada energi fosil di mana Indonesia masih memiliki beberapa proyek PLTU yang belum selesai dibangun. Untuk membantu proses transisi ini, pemerintahan Denmark melalui Danida telah mendonasikan 10 juta DKK atau sekitar 22 miliar rupiah untuk membantu menjembatani kolaborasi riset antara Denmark dan Indonesia. Proyek ini dipimpin oleh Peter Gammeltoft dari Copenhagen Business School akan menganalisis sektor energi Indonesia serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan untuk mengimplementasikan proyek-proyek transisi energi.

Gammeltoft menekankan bahwa tantang terbesar dalam mengakhiri penggunaan batu bara dalam bauran energi Indonesia sangat terkait dengan tata kelola. Faktor ini sangat terkait dengan sistem institusional yang mengelola sektor energi, seperti keputusan politis, legislasi, insentif, dan pendanaan. Tata kelola yang lemah juga menjelaskan mengapa Indonesia kesulitan dalam mencapai nol bersih (net zero) meskipun telah menandatangani berbagai perjanjian internasional dalam pengurangan emisi karbon.

Proyek riset ini bertujuan untuk memahami secara lebih komprehensif tantangan dalam memperbaiki dan memperkuat tata kelola dalam sektor energi di Indonesia, dan lebih lanjut mempercepat kemajuan dalam transisi energi. Proyek ini akan berfokus pada sektor kelistrikan yang merupakan sektor penghasil emisi karbon terbesar. Lebih lanjut, studi ini juga bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola, struktur kepemilikan, subsidi, tarif, dan hubungan antara otoritas publik. Kolaborasi dengan universitas-universitas di Indonesia dan pelatihan doktoral diharapkan dapat membangun kapasitas penelitian dan mempercepat transisi energi melalui dialog progresif dalam aspek lingkungan dan bisnis. Dari sisi bisnis, studi ini juga memiliki daya tarik tersendiri untuk lembaga pengelola dana pensiun asal Denmark. Proyek ini dapat membuka prospek investasi dalam transisi energi di negara berkembang seperti Indonesia. Investasi dalam energi hijau tidak hanya menghasilkan dampak yang besar untuk memperlambat perubahan iklim, namun juga menghasilkan keuntungan finansial yang besar.

RINGKASAN PUBLIKASI LPEM FEB UI BULAN JULI 2023

Seri Analisa Makroekonomi : BI Board of Governors Meeting, Juni 2023

Angka inflasi turun dan berhasil masuk ke dalam kisaran target BI sebesar $3\pm 1\%$. Indikator lain seperti IKK dan PMI juga menunjukkan bahwa kondisi perekonomian domestik tetap solid dengan ekspektasi konsumen yang positif serta kegiatan produksi yang ekspansif. Dari sisi eksternal, keputusan The Fed untuk mempertahankan tingkat suku bunga telah memberikan Indonesia kesempatan untuk mempertahankan selisih imbal hasil antara Obligasi Pemerintah dengan US Treasury Bonds. Hal tersebut memberikan dampak yang positif ditandai dengan adanya aliran dana masuk ke Indonesia serta kinerja Rupiah yang kuat dibandingkan dengan mata uang negara berkembang lainnya. Mempertimbangkan hal tersebut, kami melihat bahwa BI harus mempertahankan suku bunga kebijakannya pada 5,75% untuk menjaga stabilitas Rupiah sembari mencermati keputusan The Fed pada pertemuan FOMC mendatang.

PRESS RELEASE: Mendorong Pengembangan Indikator Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) dan Sustainable Development Goals Hub UI (SDGs Hub UI) bekerjasama dengan International Institute for Sustainable Development Canada (IISD Canada) untuk melakukan studi terkait comprehensive wealth di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengedepankan perhitungan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dengan melihat indikator-indikator pertumbuhan di luar dari indikator Produk Domestik Bruto (PDB).

LABOR MARKET BRIEF Volume 4, Nomor 7, Juli 2023

Perluasan cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah Indonesia terutama dalam meningkatkan kepesertaan pekerja bukan penerima upah. Dengan karakteristik yang cenderung rentan terhadap adanya shock maupun memiliki risiko pekerjaan yang tinggi, skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) perlu menjadi prioritas untuk diimplementasikan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan perlindungan bagi kelompok pekerja ini. Menjelang dua puluh tahun pemberlakuan UU SJSN dapat menjadi momentum yang tepat dalam penerapan PBI untuk jaminan sosial ketenagakerjaan.

LPEM FEB UI: Survei Konsumen Platform Digital Pasca Pandemi dan Dampak Penyatuan Perusahaan terhadap Kepuasan Konsumen, Studi Kasus GoTo.

Belanja konsumen Indonesia untuk platform digital seperti layanan on-demand dan belanja online tetap stabil atau meningkat, seiring dengan pelonggaran aktivitas fisik dan ekonomi di tahun 2022. Hal tersebut menandakan pergeseran perilaku konsumen dari masa pra-pandemi. Demikian kajian terbaru dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ("LPEM FEB UI") kepada 500 konsumen yang memanfaatkan platform digital Gojek dan Tokopedia.

Seri Analisa Makroekonomi : Inflasi Bulanan, Juli 2023

Inflasi tahun ke tahun (YoY) pada Juni 2023 dilaporkan sebesar 3,52% atau menurun sebesar 0,48% dibandingkan dengan inflasi tahunan di Mei 2023. Dengan demikian inflasi umum YoY telah konsisten mengalami penurunan setelah puncaknya pada bulan September 2022. Inflasi umum bulan ini terutama disebabkan oleh komponen harga diatur pemerintah yang mengalami inflasi YoY sebesar 9,21%. Inflasi YoY terjadi pada seluruh sektor kecuali sektor informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (-0,23%), yang secara konsisten mengalami deflasi selama 19 bulan terakhir. Kenaikan harga YoY yang paling tinggi terjadi pada sektor energi (11,35%) dan transportasi (10,18%). Inflasi YoY untuk kedua sektor tersebut telah menembus double digit sejak bulan September tahun lalu.

GSRAT Guidelines 2023

Perubahan iklim dan kebijakan penanganannya memiliki dampak besar terhadap risiko fisik dan risiko transisi bagi perekonomian. Risiko fisik perubahan iklim melibatkan kerusakan langsung pada masyarakat, aset, dan aktivitas ekonomi berupa bencana alam atau kondisi cuaca ekstrim. The Global Systemic Risk Assessment Tool (G-SRAT) hadir sebagai portal data dan analitik yang membantu pemangku kepentingan dalam memahami risiko fisik terkait perubahan iklim. G-SRAT menyajikan peta interaktif yang menggambarkan ancaman bencana, paparan, kerentanan, dan risiko infrastruktur dan masyarakat secara global. Dokumen panduan ini dirancang untuk memudahkan penggunaan G-SRAT sesuai kebutuhan. G-SRAT memberikan informasi yang berharga bagi lembaga keuangan, perusahaan, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan.

JULI 2023 | @LPEM FEB UI | [0811-8698-677](tel:0811-8698-677)

JADWAL DIKLAT LPEM FEB UI 2023



- **Policy Paper**
3 Oktober - 5 Oktober 2023
- **Ekonometrika**
6 November - 10 November 2023
- **Ekonomi Makro**
16 Oktober - 18 Oktober 2023
- **Perencanaan dan Penganggaran**
21 Agu - 25 Agu 2023
- **Analisis Kebijakan Publik (AKP)**
11 September - 15 September 2023
4 Desember - 8 Desember 2023
- **Computable General Equilibrium (CGE)**
19 September - 21 September 2023
- **Regulatory Impact Assesment (RIA)**
29 Agustus - 31 Agustus 2023
- **Penyusunan RPJMD**
4 September - 8 September 2023
- **Monitoring dan Evaluasi**
14 Agustus - 16 Agustus 2023
14 November - 16 November 2023

Informasi mengenai Diklat selengkapnya:

- Website: www.diklat.lpem.org
- Pendaftaran: <https://linktr.ee/DiklatLPEMFEBUI>
- Email: diklat@lpem-feui.org / diklatlpem2021@gmail.com
- Whatsapp: <https://wa.me/6281196103130>

Acknowledgement

LPEM Newsletter merupakan inisiatif yang didukung oleh David and Lucile Packard Foundation. Sejak 1964, David and Lucile Packard Foundation telah memberikan hibah dengan tujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat seraya memungkinkan terciptanya kegiatan keilmuan dan perlindungan sistem kehidupan alam. Dukungan dari David and Lucile Packard Foundation tidak hanya dalam produksi newsletter, tetapi juga rangkaian riset terkait isu ekonomi lingkungan yang dilakukan oleh LPEM FEB UI.